

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini sektor kepariwisataan memiliki kedudukan yang penting sebagai salah satu pilar pembangunan disuatu daerah dengan peran dan posisinya dalam memberikan kontribusi baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja, sehingga dalam perkembangannya sektor pariwisata kini menjadi industri yang mengglobal serta berorientasi untuk peningkatan ekonomis masyarakat dan pertumbuhan perekonomian.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pilar pembangunan pemerintah atau pun *stakeholders* kepariwisataan untuk berusaha menggali, mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata, guna meningkatkan pendapatan daerah dan mampu menjadi sektor penggerak perekonomian masyarakat daerah, dalam pengembangan sektor pariwisata daerah dituntut adanya suatu perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu dan komprehensif mencakup seluruh komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik

Salah satu daerah dimana sektor pariwisatanya telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Kota Jogja. Yogyakarta disamping dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan potensi pesona alam dan budayanya yang hingga saat ini masih menjadi daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan Mancanegara.

Adapun keunggulan sektor pariwisata yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga sampai saat ini Yogyakarta masih memegang predikat sebagai Daerah Tujuan Wisata terkemuka di Indonesia yaitu :

1. Informasi pariwisata di Yogyakarta mudah didapatkan
2. Akomodasi mudah dijangkau
3. Keragaman tempat wisata dan jenis wisata
4. Berbiaya murah

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 2012, tentang induk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi DIY Tahun 2012 -2025, disebutkan bahwa visi pembangunan kepariwisataan di Provinsi DIY adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Pengembangan Kepariwisata DIY, maka sasaran strategisnya. Pada Tahun 2012 yang dikutip dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Prov. DIY TA. 2011 adalah :

- a) Meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman.
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman.
- d) Mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- e) Meningkatnya PAD sektor Pariwisata

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut maka diimplementasikan dilakukan melalui 3 program pokok yakni :

- a) Program pengembangan pemasaran pariwisata
- b) Program pengembangan destinasi pariwisata
- c) Program pengembangan kemitraan

Namun seiring perkembangan sektor pariwisata permasalahannya sekarang justru terdapat di dalam diri Yogyakarta sendiri. Perkembangan sektor pariwisata yang terus berkembang turut menimbulkan permasalahan

masih rendah. Pasalnya, banyak wisatawan yang mengeluh saat datang ke Jogja mulai dari pelayanan yang kurang nyaman, fasilitas yang kurang memadai hingga masalah tarif parkir yang menjengkelkan yang dilakukan oleh oknum petugas parkir yang mematok tarif parkir melebihi tarif yang telah diatur. (*Harian Jogja 25/12/2012*).

Permasalahan lainnya yang terkait adalah Lama tinggal wisatawan di DIY pada tahun 2012 yang belum mencapai lebih dari tiga hari, yaitu rata-rata baru 2,3 hari. meskipun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta lebih banyak dibanding jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung, namun kurangnya inovasi tujuan wisata di Yogyakarta menyebabkan wisatawan tidak perlu berlama-lama tinggal. (*KOMPAS 7/4/2012*).

Dari urian latar belakang diatas penulis ingin mengambil permasalahan ***“Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan***

..... 2012”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan melalui latar belakang permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara?
- 2) Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengembangan pariwisata ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi DIY dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai Tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2012
- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan strategi Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- b) Istilah pemerintah menunjuk pada badan, organ yang menjelaskan fungsi itu.

Selanjutnya ia menjelaskan tentang pengertian dari pemerintah dalam arti luas dan arti sempit sebagai berikut :

- a) Pemerintah dalam arti luas adalah segala sesuatu tugas kewenangan/kekuasaan negara yang mengikuti pembagian dari Montesquieu yang meliputi bidang eksekutif, legislative dan yudikatif.
- b) Pemerintah dalam arti sempit adalah sebagai tugas atau kewenangan/kekuasaan dalam bidang eksekutif saja.

Sedangkan didalam sistem negara Indonesia yang menganut sistem Negara Kesatuan berdasarkan pasal 18 UUD 1945 memberikan kekuasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atas asas desentralisasi yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah

Undang-Undang Dasar dan Berangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintahan Daerah dengan maksud untuk lebih mememberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Karena itu hak hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menurut Mariun (1979:55) dimasukan kedalam organisasi . dijelaskan bahwa yang termasuk dalam unsur unsur organisasi antara lain: kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama yang hanya dapat diselenggarakan dengan kerjasama atau usaha antar kelompok usaha itu supaya kerjasama itu dapat dilakukan dengan pembagian kerja dibawah suatu pimpinan. Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan istilah pemerintah maka dapat dikatakan bahwa organisasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan dari sekelompok manusia yang berkerjasama dan merupakan aparatur pemerintah yang diberikan kewenangan hak atau kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan pembagian tugas dibawah Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan tentang pengertian Pemerintah dan Pemerintah Daerah . Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah yang dibentuk dalam wilayah negara akibat diterapkannya sistem Desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

berwenang ,berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2) Kebijakan

Menurut Ealau dan Pewitt (dalam ridwan:2010:par 4) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku,dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan sesungguhnya adalah upaya yang dilakukakn oleh para pengambil keputusan dalam rangka memberikan sebuah jawaban terhadap suatu permasalahan yang ada. Dan umumnya didalam suatu kebijakan terdapat pedoman pelaksanaan dalam menindak lanjuti strategi yang dipilih.

Sedangkan Easton 1969 (dalam petrijon:2010:par 4) berpendapat bahwa Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton

merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Sedangkan menurut Woll 1966 (dalam petrijon:2010:par 4) Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

- a) Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah :
Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- b) Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada Level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. definisi kebijakan publik menurut woll ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik

Dari beberapa definisi kebijakan yang dikemukakan para ahli dapat disederhanakan bahwa kebijakan adalah tindakan pemerintah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada didalam masyarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3) Implementasi kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan Grindle (dalam Akib, dan Tarigan:2010:2), menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (dalam Akib, dan Tarigan:2010:2), menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (dalam Akib, dan Tarigan:2010:2), menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane dalam implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang

Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini) adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu . (Akib, dan Tarigan:2010:2).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (dalam Akib, dan Tarigan:2010:2), bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Widodo 2011:98) . Dalam

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan

harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b) Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber daya manusia (*staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber

kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara

menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi

mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

5) Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menurut Rangkuti (2002:3) sebagaimana mengutip Chandler, strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta

Selanjutnya menurut Suwanto (1997:56) ada beberapa langkah pokok dalam melakukan pengembangan pariwisata yaitu :

- a) Dalam jangka pendek dititik beratkan pada optimal.
- b) Dalam jangka menengah dititik beratkan pada konsolidasi.
- c) Dalam jangka panjang dititik beratkan pada pengembangan dan penyebaran

Menurut Marpaung (2007:19) : pengembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat . Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi keduanya menguntungkan wisatawan ,maupun warga setempat , sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata.

Selanjutnya ditambahkan Yoeti (1997: 2-3), pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Wisatawan (*Tourist*)

Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan.

- b) Transportasi

Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia

c) Atraksi/obyek wisata

Atraksi dan objek wisata yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat seperti: a) Apa yang dapat dilihat (*something to see*), b) Apa yang dapat dilakukan (*something to do*), c) Apa yang dapat dibeli (*something to buy*).

d) Fasilitas pelayanan

Fasilitas apa saja yang tersedia di DTW tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, *restaurant*, pelayanan umum seperti *Bank/money changers*, kantor pos, telepon/teleks yang ada di DTW tersebut.

e) Informasi dan promosi

Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana *leaflets/* brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya.

Selanjutnya Muchamad Zaenuri (2012:6) menyatakan dalam Pembangunan Kepariwisata ada komponen komponen yang diperhatikan yaitu:

- a) Destinasi Pariwisata meliputi pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui

- b) Pemasaran pariwisata meliputi pengembangan pasarwisatawan pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, pengembangan promosi pariwisata
- c) Industri pariwisata meliputi penguatan struktur industry pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, perencanaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- d) Kelembagaan kepariwisataan meliputi penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Manfaat dibalik pengembangan pariwisata di Indonesia sebenarnya telah perhitungkan oleh negara sejak dahulu. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada Inpres No 9 Tahun 1969 pasal 3 yang menyatakan bahwa Usaha pengembangan pariwisata di Indonesia merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara.

Melihat komponen komponen pembangunan kepariwisataan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan pembangunan yang memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat guna merencanakan , mengarahkan serta menjalankan pembangunan kepariwisataan yang diharapkan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat setidaknya

Sehingga pembangunan kepariwisataan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman. Definisi konsepsional juga merupakan suatu pengertian dari kelompok dan gejala yang menjadi pokok perhatian, maka berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa definisi konsepsional yang dapat saya berikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi Pemerintah Daerah adalah lembaga / organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di di daerah atau dengan kata lain organisasi pemerintah daerah bertugas untuk melaksanakan tugas tugas yang di berikan oleh pemerintah pusat.
- 2) Kebijakan adalah suatu tindakan atau tanggapan yang dikeluarkan oleh organisasi / pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang terjadi dengan maksud mewujudkan suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan.
- 3) Pengembangan Pariwisata adalah empat komponen pembangunan keparwiwsataan antara lain destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan

... penelitian deskriptif adalah penelitian yang cenderung pada penelitian

2) Unit Analisa Data

Unit analisa data merupakan unit unit yang terlihat secara langsung didalam analisis penelitian, dalam penelitian ini unit analisa yang terlibat yakni Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari beberapa bagian yakni Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pengembangan Kapasitas, Bidang Pemasaran dan para *Stake holder* yang terkait.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Provinsi DIY dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsin Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka Di Asia Tenggara.

4) Sumber Data

a) Data Primer

Menurut Prastowo (2010 : 20) “Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya” yang didapat melalui wawancara dan observasi. data ini didapat melalui hasil wawancara dari berbagai pihak yang mengetahui dan memahami tentang *“Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata*

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti lewat orang lain atau dokumen. data sekunder yang penulis pakai adalah dokumen ,arsip dan buku buku yang relevan dengan penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk itu pengumpulan data-data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya,dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel. ”, wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Bapak Heri Lantjono selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata ,Bapak Sinang Sukanta selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ibu Kustriatri selaku Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas ,Bapak Istijab Danunagoro selaku ketua PHRI BPD DIY (Perhimpunan Hotel

(wisatawan dari bekasi),Ria (wisatawan dari bogor) dan Vera (wisatawan dari jakarta)

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pencarian data yang sudah diwujudkan dalam bentuk dokumen. Data tersebut antara lain berupa publikasi, laporan hasil dan sebagainya. Menurut Sugiyono yang diikuti oleh Prastowo (2010 : 191). Dokumentasi yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu, jadi dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.

Menurut Nasution yang dikutip oleh Prastowo (2010 : 192). Keuntungan bahan tulisan ini antara lain ialah bahan ini telah ada, telah tersedia dan siap pakai, menggunakan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya, banyak pengetahuan yang dapat ditimba dari bahan ini bila dianalisis dengan cermat yang berguna bagi penelitian yang dilakukan

6) Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Yang dimaksud dengan analisa data kualitatif menurut Menurut Patton 1980, (*dalam Lexy J. Moleong 2002: 103*) analisa data merupakan proses mengatur urutan data ,mengorganisasikanya kedalam pola ,kategori dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini proses analisa data yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara dan pengamatan data sekunder).
- b) Menyusun data guna menemukan hubungan antara data.
- c) Menyusun data secara tertulis

1. Mengorganisasikan data dan memahaminya untuk menghasilkan